

SALINAN



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 08 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Ke dua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/pmk.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun anggaran 2016 sudah tidak sesuai, sehingga perlu diatur kembali;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 157 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomore 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian Penyaluran Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Bupati, adalah Bupati Ponorogo.
3. Camat, adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
4. Desa, adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, ketrampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Dana Desa yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG kabupaten yang bersangkutan.

DD kabupaten = pagu DD kabupaten.

AD kabupaten = alokasi dasar untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 5

Pengalokasian dan Penetapan DD untuk setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN dan PENCAIRAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran DD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah DD diterima di RKUD.
- (3) Penyaluran DD dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus); dan
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus).

Pasal 7

- (1) Penyaluran DD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan setelah Bupati menerima dokumen dari Kepala Desa yang berisi:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun anggaran berjalan;
 - b. laporan realisasi penggunaan DD tahap sebelumnya ;dan
 - c. Pengajuan pencairan.
- (2) Pengajuan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Rekomendasi Camat dengan dilampiri :
 - a. Tahap I :
 1. permohonan pencairan dari Kepala Desa;
 2. foto copy Buku Rekening Kas Desa;
 3. foto copy Pengangkatan Bendahara Desa dalam Keputusan Kepala Desa tentang Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa ;
 4. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
 5. foto copy Kartu Tanda Penduduk Bendahara Desa; dan
 6. kwitansi.
 - b. Tahap II :
 1. Laporan realisasi penggunaan DD tahap I yang menunjukkan paling kurang 50 % (lima puluh perseratus);
 2. Permohonan pencairan dari Kepala Desa ;dan
 3. Kwitansi.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 8

Prioritas Penggunaan DD untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal Desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Prioritas Penggunaan DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, menjadi prioritas kegiatan, yang disepakati melalui Musyawarah Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RKP Desa dan APB Desa.
- (3) RKP Desa dan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua
Bidang Pembangunan Desa

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, prioritas penggunaan DD diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan Pembangunan Desa, meliputi :
 - a. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan pemukiman;
 - b. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
 - c. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan;
 - d. pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; dan/atau
 - e. pembangunan dan pengembangan sarana prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- (2) Pemerintah Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa dapat mengembangkan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai daftar kewenangan Hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 11

Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi :

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa.
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan kesehatan

masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan

- c. Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 12

Prioritas penggunaan DD untuk program dan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa, antara lain :

- a. peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
- b. dukungan kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa atau BUM Desa Bersama, maupun oleh kelompok dan atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya;
- c. bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan Desa;
- d. pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum masyarakat desa, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD) dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat di Desa (Community Centre);
- e. promosi dan edukasi masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan Posyandu, Poskesdes, Polindes dan ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis/swamedikasi di Desa;
- f. dukungan terhadap kegiatan pengelolaan Hutan;
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan/atau
- h. bidang kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya sesuai dengan analisa kebutuhan desa dan telah ditetapkan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 13

Perencanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilakukan dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan tipologi desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, yaitu:

- a. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada membuka lapangan kerja dan/atau usaha baru, serta bantuan penyiapan infrastruktur bagi terselenggaranya kerja dan usaha warga atau masyarakat baik dari proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat desa;
- b. Desa berkembang, memprioritaskan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerja dan/atau proses produksi sampai pemasaran produk, serta pemenuhan kebutuhan atau akses modal/fasilitas keuangan;

- c. Desa maju dan/atau mandiri, mengembangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang visioner dengan menjadikan desa sebagai lumbung ekonomi atau capital rakyat, dimana desa dapat menghidupi dirinya sendiri atau memiliki kedaulatan ekonomi, serta mampu mengembangkan potensi atau sumberdaya ekonomi atau manusia dan kapital desa secara berkelanjutan.

BAB V PENGELOLAAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Penerimaan dan penggunaan DD oleh Desa setiap tahun dianggarkan dalam APB Desa.
- (2) Pengelolaan keuangan DD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan berlaku dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB VI PEMBINAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 15

Bupati melaksanakan fungsi pembinaan, monitoring, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan DD sejak proses perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pemanfaatannya.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi tentang penggunaan DD dengan membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan DD.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap :
 - a. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan penggunaan DD; dan
 - b. Sisa DD.

BAB VII PENUNDAAN DAN PEMOTONGAN PENYALURAN

Bagian Kesatu Penundaan Penyaluran

Pasal 17

- (1) Bupati menunda penyaluran DD dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c;
 - b. terdapat Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh perseratus) ; dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran DD tahap 1 tahun anggaran berjalan sebesar Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Dalam hal Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah DD yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran DD tahap I tidak dilakukan.
- (4) Penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa DD di RKD menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari anggran DD tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan juli tahun anggaran berjalan Sisa DD di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh perseratus), penyaluran DD yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran DD tahap II.

Pasal 18

- (1) Bupati menyalurkan kembali DD yang ditunda dalam hal :
 - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c telah diterima; dan/atau
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, DD tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa DD di RKUD.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala desa yang bersangkutan mengenai DD yang di tunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APB Desa tahun anggaran berikutnya.
- (4) Bupati menganggarkan kembali sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali DD dari RKUD ke RKD.
- (5) Dalam hal rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan, sisa DD di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dengan cara menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (6) Dalam hal sisa DD di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum di salurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan february tahun anggaran berjalan, akan diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran DD tahap I dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.

Bagian ke Dua

Pemotongan Penyaluran DD

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran DD dalam hal setelah dilakukan penundaan penyaluran DD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa DD di RKD lebih dari 30% (tiga puluh perseratus).
- (2) Pemotongan penyaluran DD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran DD tahun anggaran berikutnya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 71 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian DD Setiap Desa se-Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2016, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 April 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Diundangkan di Ponorogo
Pada tanggal 01 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 08

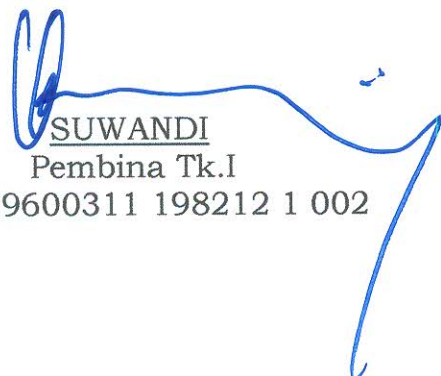
Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. BUPATI PONOROGO

Sekretaris Daerah

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM 


SUWANDI
Pembina Tk.I
NIP. 19600311 198212 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 08 TAHUN 2016

TANGGAL : 01 APRIL 2016

BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN PONOROGO
TAHUN 2016

NO.	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	BESARAN DANA DESA (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I	SLAHUNG	1. TUGUREJO	565,640,000	101,277,000	666,917,000
		2. SENEPO	565,640,000	92,613,000	658,253,000
		3. SLAHUNG	565,640,000	163,828,000	729,468,000
		4. CALUK	565,640,000	51,186,000	616,826,000
		5. BROTO	565,640,000	41,189,000	606,829,000
		6. MENGGARE	565,640,000	34,013,000	599,653,000
		7. KAMBENG	565,640,000	56,779,000	622,419,000
		8. WATES	565,640,000	133,408,000	699,048,000
		9. NGILO-ILO	565,640,000	88,247,000	653,887,000
		10. DURI	565,640,000	65,919,000	631,559,000
		11. NGLONING	565,640,000	35,661,000	601,301,000
		12. PLANCUNGAN	565,640,000	47,670,000	613,310,000
		13. JEBENG	565,640,000	33,078,000	598,718,000
		14. GALAK	565,640,000	32,436,000	598,076,000
		15. TRUNENG	565,640,000	30,976,000	596,616,000
		16. SIMO	565,640,000	38,299,000	603,939,000
		17. CRABAK	565,640,000	55,154,000	620,794,000
		18. MOJOPITU	565,640,000	32,112,000	597,752,000
		19. GUNDIK	565,640,000	38,538,000	604,178,000
		20. NAILAN	565,640,000	33,617,000	599,257,000
		21. GOMBANG	565,640,000	36,937,000	602,577,000
		22. JANTI	565,640,000	41,070,000	606,710,000
		Total	12,444,080,000	1,284,007,000	13,728,087,000
II	NGRAYUN	1. WONODADI	565,640,000	160,645,000	726,285,000
		2. SENDANG	565,640,000	153,291,000	718,931,000
		3. BAOSAN KIDUL	565,640,000	272,756,000	838,396,000
		4. BINADE	565,640,000	86,262,000	651,902,000
		5. MRAYAN	565,640,000	216,733,000	782,373,000
		6. BAOSAN LOR	565,640,000	205,193,000	770,833,000
		7. TEMON	565,640,000	113,940,000	679,580,000
		8. SELUR	565,640,000	222,234,000	787,874,000
		9. NGRAYUN	565,640,000	187,269,000	752,909,000
		10. CEPOKO	565,640,000	200,503,000	766,143,000
		11. GEDANGAN	565,640,000	187,774,000	753,414,000
		Total	6,222,040,000	2,006,600,000	8,228,640,000
III	BUNGKAL	1. PELEM	565,640,000	61,191,000	626,831,000
		2. KORIPAN	565,640,000	43,284,000	608,924,000
		3. BEKARE	565,640,000	39,783,000	605,423,000
		4. NAMBAK	565,640,000	47,669,000	613,309,000
		5. KALISAT	565,640,000	44,128,000	609,768,000
		6. MUNGGU	565,640,000	132,449,000	698,089,000
		7. PAGER	565,640,000	55,437,000	621,077,000
		8. BELANG	565,640,000	37,300,000	602,940,000
		9. BUNGKAL	565,640,000	33,277,000	598,917,000

		10 KETONGGO	565,640,000	36,193,000	601,833,000
		11. KUNTI	565,640,000	35,341,000	600,981,000
		12. BANCAR	565,640,000	46,354,000	611,994,000
		13. PADAS	565,640,000	44,280,000	609,920,000
		14. BUNGU	565,640,000	33,868,000	599,508,000
		15. KUPUK	565,640,000	71,376,000	637,016,000
		16. SAMBILAWANG	565,640,000	53,571,000	619,211,000
		17. KWAJON	565,640,000	37,164,000	602,804,000
		18. BEDIWETAN	565,640,000	42,254,000	607,894,000
		19. BEDIKULON	565,640,000	36,526,000	602,166,000
		Total	10,747,160,000	931,445,000	11,678,605,000
IV	SAMBIT	1. GAJAH	565,640,000	116,168,000	681,808,000
		2. WRINGINANOM	565,640,000	113,179,000	678,819,000
		3. NGADISANAN	565,640,000	61,537,000	627,177,000
		4. MAGUWAN	565,640,000	58,679,000	624,319,000
		5. NGLEWAN	565,640,000	72,521,000	638,161,000
		6. BEDINGIN	565,640,000	44,357,000	609,997,000
		7. BANCANGAN	565,640,000	38,395,000	604,035,000
		8. CAMPUREJO	565,640,000	54,204,000	619,844,000
		9. CAMPURSARI	565,640,000	25,238,000	590,878,000
		10. BULU	565,640,000	30,634,000	596,274,000
		11. SAMBIT	565,640,000	26,351,000	591,991,000
		12. BESUKI	565,640,000	34,456,000	600,096,000
		13. WILANGAN	565,640,000	32,655,000	598,295,000
		14. BANGSALAN	565,640,000	38,613,000	604,253,000
		15. KEMUNING	565,640,000	33,187,000	598,827,000
		16. JRAKAH	565,640,000	79,502,000	645,142,000
		Total	9,050,240,000	859,676,000	9,909,916,000
V	SAWOO	1. TUMPUK	565,640,000	148,710,000	714,350,000
		2. PANGKAL	565,640,000	148,125,000	713,765,000
		3. TUMPAK PELEM	565,640,000	92,546,000	658,186,000
		4. TEMPURAN	565,640,000	179,622,000	745,262,000
		5. SRITI	565,640,000	129,672,000	695,312,000
		6. TEMON	565,640,000	177,394,000	743,034,000
		7. SAWOO	565,640,000	117,660,000	683,300,000
		8. PRAYUNGAN	565,640,000	66,689,000	632,329,000
		9. TUGUREJO	565,640,000	43,900,000	609,540,000
		10. GROGOL	565,640,000	117,626,000	683,266,000
		11. KETRO	565,640,000	36,800,000	602,440,000
		12. KORI	565,640,000	55,169,000	620,809,000
		13. BONDRANG	565,640,000	36,051,000	601,691,000
		14. NGINDENG	565,640,000	59,727,000	625,367,000
		Total	7,918,960,000	1,409,691,000	9,328,651,000
VI	SOOKO	1. NGADIROJO	565,640,000	115,312,000	680,952,000
		2. KLEPU	565,640,000	80,356,000	645,996,000
		3. SURU	565,640,000	90,055,000	655,695,000
		4. SOOKO	565,640,000	81,735,000	647,375,000
		5. BEDOHO	565,640,000	57,282,000	622,922,000
		6. JURUG	565,640,000	114,183,000	679,823,000
		Total	3,393,840,000	538,923,000	3,932,763,000
VII	PULUNG	1. KARANGPATIHAN	565,640,000	56,307,000	621,947,000
		2. TEGALREJO	565,640,000	36,297,000	601,937,000
		3. BEDRUG	565,640,000	50,077,000	615,717,000
		4. WAGIR KIDUL	565,640,000	113,385,000	679,025,000
		5. SINGGAHAN	565,640,000	58,064,000	623,704,000

		6. PATIK	565,640,000	40,480,000	606,120,000
		7. PULUNG	565,640,000	44,166,000	609,806,000
		8. PULUNG MERDIKO	565,640,000	35,408,000	601,048,000
		9. SIDOHARJO	565,640,000	92,624,000	658,264,000
		10. WOTAN	565,640,000	45,259,000	610,899,000
		11. PLUNTURAN	565,640,000	81,408,000	647,048,000
		12. POMAHAN	565,640,000	78,186,000	643,826,000
		13. KESUGIHAN	565,640,000	36,842,000	602,482,000
		14. SERAG	565,640,000	39,172,000	604,812,000
		15. WAYANG	565,640,000	39,857,000	605,497,000
		16. MUNGUNG	565,640,000	99,320,000	664,960,000
		17. BEKIRING	565,640,000	74,054,000	639,694,000
		18. BANARAN	565,640,000	101,519,000	667,159,000
		Total	10,181,520,000	1,122,425,000	11,303,945,000
VIII	MLARAK	1. TUGU	565,640,000	60,620,000	626,260,000
		2. CANDI	565,640,000	59,225,000	624,865,000
		3. TOTOKAN	565,640,000	54,087,000	619,727,000
		4. NGRUKEM	565,640,000	51,153,000	616,793,000
		5. SIWALAN	565,640,000	38,120,000	603,760,000
		6. JORESAN	565,640,000	36,442,000	602,082,000
		7. NGLUMPANG	565,640,000	35,977,000	601,617,000
		8. GONTOR	565,640,000	38,035,000	603,675,000
		9. GANDU	565,640,000	36,789,000	602,429,000
		10. JABUNG	565,640,000	56,640,000	622,280,000
		11. BAJANG	565,640,000	29,210,000	594,850,000
		12. MLARAK	565,640,000	43,323,000	608,963,000
		13. SERANGAN	565,640,000	36,347,000	601,987,000
		14. SUREN	565,640,000	60,720,000	626,360,000
		15. KAPONAN	565,640,000	55,137,000	620,777,000
		Total	8,484,600,000	691,825,000	9,176,425,000
IX	JETIS	1. NGASINAN	565,640,000	94,406,000	660,046,000
		2. KUTU KULON	565,640,000	33,337,000	598,977,000
		3. KUTU WETAN	565,640,000	53,518,000	619,158,000
		4. KRADENAN	565,640,000	34,947,000	600,587,000
		5. MOJOMATI	565,640,000	31,237,000	596,877,000
		6. COPER	565,640,000	51,745,000	617,385,000
		7. MOJOREJO	565,640,000	42,539,000	608,179,000
		8. KARANGGEBANG	565,640,000	50,002,000	615,642,000
		9. JETIS	565,640,000	31,243,000	596,883,000
		10. TEGALSARI	565,640,000	44,241,000	609,881,000
		11. WONOKETRO	565,640,000	32,231,000	597,871,000
		12. JOSARI	565,640,000	44,828,000	610,468,000
		13. TURI	565,640,000	69,845,000	635,485,000
		14. WINONG	565,640,000	51,536,000	617,176,000
		Total	7,918,960,000	665,655,000	8,584,615,000
X	SIMAN	1. DEMANGAN	565,640,000	49,419,000	615,059,000
		2. NGABAR	565,640,000	43,246,000	608,886,000
		3. MADUSARI	565,640,000	28,118,000	593,758,000
		4. BETON	565,640,000	43,670,000	609,310,000
		5. SEKARAN	565,640,000	39,103,000	604,743,000
		6. BRAHU	565,640,000	41,756,000	607,396,000
		7. KEPUHRUBUH	565,640,000	37,322,000	602,962,000
		8. SAWUH	565,640,000	28,495,000	594,135,000
		9. JARAK	565,640,000	40,595,000	606,235,000
		10. TRANJANG	565,640,000	38,825,000	604,465,000
		11. PIJERAN	565,640,000	54,692,000	620,332,000

		12. MANUK	565,640,000	39,095,000	604,735,000
		13. SIMAN	565,640,000	38,552,000	604,192,000
		14. PATIHAN KIDUL	565,640,000	44,582,000	610,222,000
		15. RONOSANTANAN	565,640,000	50,938,000	616,578,000
		16. TAJUG	565,640,000	51,245,000	616,885,000
		Total	9,050,240,000	669,653,000	9,719,893,000
XI	BALONG	1. PANDAK	565,640,000	92,142,000	657,782,000
		2. BULU KIDUL	565,640,000	38,198,000	603,838,000
		3. BULAK	565,640,000	43,925,000	609,565,000
		4. NGENDUT	565,640,000	69,050,000	634,690,000
		5. KARANGPATIHAN	565,640,000	120,564,000	686,204,000
		6. SUMBEREJO	565,640,000	45,648,000	611,288,000
		7. NGUMPUL	565,640,000	40,414,000	606,054,000
		8. NGRAKET	565,640,000	32,057,000	597,697,000
		9. DADAPAN	565,640,000	37,017,000	602,657,000
		10. SINGKIL	565,640,000	42,371,000	608,011,000
		11. KARANGAN	565,640,000	55,515,000	621,155,000
		12. BAJANG	565,640,000	51,243,000	616,883,000
		13. BALONG	565,640,000	43,319,000	608,959,000
		14. JALEN	565,640,000	38,680,000	604,320,000
		15. KARANGMOJO	565,640,000	29,451,000	595,091,000
		16. SEDARAT	565,640,000	58,081,000	623,721,000
		17. PURWOREJO	565,640,000	52,082,000	617,722,000
		18. TATUNG	565,640,000	65,585,000	631,225,000
		19. MUNENG	565,640,000	56,553,000	622,193,000
		20. NGAMPEL	565,640,000	52,154,000	617,794,000
		Total	11,312,800,000	1,064,049,000	12,376,849,000
XII	KAUMAN	1. TEGALOMBO	565,640,000	68,916,000	634,556,000
		2. NONGKODONO	565,640,000	46,328,000	611,968,000
		3. SUKOSARI	565,640,000	41,299,000	606,939,000
		4. NGRANDU	565,640,000	85,380,000	651,020,000
		5. NGLARANGAN	565,640,000	24,139,000	589,779,000
		6. BRINGIN	565,640,000	53,242,000	618,882,000
		7. PENGKOL	565,640,000	66,075,000	631,715,000
		8. GABEL	565,640,000	62,836,000	628,476,000
		9. CILUK	565,640,000	40,921,000	606,561,000
		10. SEMANDING	565,640,000	63,867,000	629,507,000
		11. TOSANAN	565,640,000	43,044,000	608,684,000
		12. MARON	565,640,000	57,700,000	623,340,000
		13. SOMOROTO	565,640,000	91,631,000	657,271,000
		14. PLOSOJENAR	565,640,000	50,664,000	616,304,000
		15. CARAT	565,640,000	58,333,000	623,973,000
		16. KAUMAN	565,640,000	82,215,000	647,855,000
		Total	9,050,240,000	936,590,000	9,986,830,000
XIII	BADEGAN	1. DAYAKAN	565,640,000	157,298,000	722,938,000
		2. KARANGAN	565,640,000	126,348,000	691,988,000
		3. TANJUNGGUNUNG	565,640,000	71,491,000	637,131,000
		4. KARANGJOHO	565,640,000	54,521,000	620,161,000
		5. TANJUNGREJO	565,640,000	93,275,000	658,915,000
		6. BANDARALIM	565,640,000	45,405,000	611,045,000
		7. KAPURAN	565,640,000	57,602,000	623,242,000
		8. WATUBONANG	565,640,000	129,218,000	694,858,000
		9. BITING	565,640,000	55,795,000	621,435,000
		10. BADEGAN	565,640,000	41,681,000	607,321,000
		Total	5,656,400,000	832,634,000	6,489,034,000

XIV	SAMPUNG	1. SAMPUNG	565,640,000	65,666,000	631,306,000
		2. POHIJO	565,640,000	67,176,000	632,816,000
		3. JENANGAN	565,640,000	45,105,000	610,745,000
		4. NGLURUP	565,640,000	43,486,000	609,126,000
		5. TULUNG	565,640,000	59,459,000	625,099,000
		6. CARANGREJO	565,640,000	69,482,000	635,122,000
		7. PAGERUKIR	565,640,000	63,696,000	629,336,000
		8. KUNTI	565,640,000	60,256,000	625,896,000
		9. GLINGGANG	565,640,000	39,121,000	604,761,000
		10. GELANGKULON	565,640,000	59,437,000	625,077,000
		11. KARANGWALUH	565,640,000	46,500,000	612,140,000
		12. RINGINPUTIH	565,640,000	59,116,000	624,756,000
		Total	6,787,680,000	678,500,000	7,466,180,000
XV	SUKOREJO	1. SUKOREJO	565,640,000	67,654,000	633,294,000
		2. BANGUNREJO	565,640,000	82,000,000	647,640,000
		3. SIDOREJO	565,640,000	79,279,000	644,919,000
		4. NAMBANGREJO	565,640,000	55,132,000	620,772,000
		5. LENGKONG	565,640,000	51,244,000	616,884,000
		6. GELANG LOR	565,640,000	59,115,000	624,755,000
		7. SERANGAN	565,640,000	39,441,000	605,081,000
		8. NAMPAN	565,640,000	35,455,000	601,095,000
		9. KRANGGAN	565,640,000	37,244,000	602,884,000
		10. GOLAN	565,640,000	42,941,000	608,581,000
		11. PRAJEGAN	565,640,000	87,427,000	653,067,000
		12. KEDUNGBANTENG	565,640,000	52,970,000	618,610,000
		13. KARANGLO LOR	565,640,000	33,927,000	599,567,000
		14. GEGERAN	565,640,000	44,984,000	610,624,000
		15. GANDUKEPUH	565,640,000	61,109,000	626,749,000
		16. KALIMALANG	565,640,000	31,098,000	596,738,000
		17. SRAGI	565,640,000	37,972,000	603,612,000
		18. MOROSARI	565,640,000	37,214,000	602,854,000
		Total	10,181,520,000	936,206,000	11,117,726,000
XVI	BABADAN	1. CEKOK	565,640,000	44,356,000	609,996,000
		2. JAPAN	565,640,000	51,552,000	617,192,000
		3. GUPOLO	565,640,000	35,914,000	601,554,000
		4. POLOREJO	565,640,000	55,709,000	621,349,000
		5. BARENG	565,640,000	40,021,000	605,661,000
		6. NGUNUT	565,640,000	59,050,000	624,690,000
		7. SUKOSARI	565,640,000	81,764,000	647,404,000
		8. LEMBAH	565,640,000	61,660,000	627,300,000
		9. PONDOK	565,640,000	47,289,000	612,929,000
		10. BABADAN	565,640,000	48,668,000	614,308,000
		11. PURWOSARI	565,640,000	59,085,000	624,725,000
		12. TRISONO	565,640,000	74,639,000	640,279,000
		Total	6,787,680,000	659,707,000	7,447,387,000
XVII	JENANGAN	1. MRICAN	565,640,000	56,410,000	622,050,000
		2. PLALANGAN	565,640,000	59,326,000	624,966,000
		3. NGLAYANG	565,640,000	36,328,000	601,968,000
		4. JENANGAN	565,640,000	55,860,000	621,500,000
		5. JIMBE	565,640,000	40,431,000	606,071,000
		6. NGRUPIT	565,640,000	64,341,000	629,981,000
		7. PINTU	565,640,000	35,273,000	600,913,000
		8. SEDAHA	565,640,000	29,474,000	595,114,000
		9. PANJENG	565,640,000	35,138,000	600,778,000
		10. SRATEN	565,640,000	29,773,000	595,413,000
		11. SEMANDING	565,640,000	36,733,000	602,373,000

		12. TANJUNGSARI	565,640,000	53,375,000	619,015,000
		13. PARINGAN	565,640,000	78,459,000	644,099,000
		14. WATES	565,640,000	57,787,000	623,427,000
		15. KEMIRI	565,640,000	74,519,000	640,159,000
		Total	8,484,600,000	743,227,000	9,227,827,000
XVIII	NGEBEL	1. NGROGUNG	565,640,000	64,722,000	630,362,000
		2. SAHANG	565,640,000	44,574,000	610,214,000
		3. WAGIR LOR	565,640,000	65,752,000	631,392,000
		4. TALUN	565,640,000	133,436,000	699,076,000
		5. GONDOWIDO	565,640,000	66,652,000	632,292,000
		6. PUPUS	565,640,000	65,381,000	631,021,000
		7. NGEBEL	565,640,000	59,726,000	625,366,000
		8. SEMPU	565,640,000	48,116,000	613,756,000
		Total	4,525,120,000	548,359,000	5,073,479,000
XIX	JAMBON	1. JONGGOL	565,640,000	78,287,000	643,927,000
		2. POKO	565,640,000	46,916,000	612,556,000
		3. SENDANG	565,640,000	56,471,000	622,111,000
		4. BRINGINAN	565,640,000	35,730,000	601,370,000
		5. KARANGLO KIDUL	565,640,000	72,681,000	638,321,000
		6. KREBET	565,640,000	164,572,000	730,212,000
		7. BULU LOR	565,640,000	98,294,000	663,934,000
		8. JAMBON	565,640,000	49,115,000	614,755,000
		9. BLEMBEM	565,640,000	108,373,000	674,013,000
		10. PULOSARI	565,640,000	49,253,000	614,893,000
		11. MENANG	565,640,000	23,598,000	589,238,000
		12. SRANDIL	565,640,000	23,437,000	589,077,000
		13. SIDOHARJO	565,640,000	183,401,000	749,041,000
		Total	7,353,320,000	990,128,000	8,343,448,000
XX	PUDAK	1. BARENG	565,640,000	63,947,000	629,587,000
		2. TAMBANG	565,640,000	54,459,000	620,099,000
		3. KRISIK	565,640,000	53,266,000	618,906,000
		4. PUDAK WETAN	565,640,000	71,123,000	636,763,000
		5. BANJAREJO	565,640,000	92,871,000	658,511,000
		6. PUDAK KULON	565,640,000	48,427,000	614,067,000
		Total	3,393,840,000	384,093,000	3,777,933,000
Jumlah Total			158,944,840,000	17,953,393,000	176,898,233,000

BUPATI PONOROGO

ttd

H.IPONG MUCLISSONI